

Determinan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah Tahun 2017-2020

Putri Rarasati*, Sitti Retno Faridatussalam

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Correspondence email: put.rarasati@gmail.com

Abstrak. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber utama dalam melakukan pembangunan di setiap daerah. Daerah tidak bisa mengandalkan sumber dana dari pusat dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja, indeks harga konsumen, investasi, dan upah minimum regional terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah tahun 2017-2020 dengan menggunakan regresi data panel. Hasil dengan pendekatan Fixed Effects menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah dan upah minimum regional berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Sementara itu, investasi dan indeks harga konsumen ditemukan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian sehingga dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu, pengendalian harga-harga komoditas barang dan jasa perlu ditingkatkan agar masyarakat masih dapat terjangkau naiknya harga yang berlaku.

Kata kunci: pendapatan asli daerah; tenaga kerja; indeks harga konsumen; investasi; upah

Abstract. Local revenue is one of the main sources in carrying out development in each region. Regions cannot rely on funding sources from the center due to the limited funds they have. This study aims to determine the effect of the number of workers, consumer price index, investment, and the regional minimum wage on the original income of the Regency or City in Central Java in 2017-2020 by using panel data regression. The results with the Fixed Effects approach show that the number of workers has a negative effect on regional original income and the regional minimum wage has a positive effect on regional original income. Meanwhile, investment and the consumer price index were found to have no effect on the original income of districts or cities in Central Java Province in 2016-2020. The government is expected to improve the economy so that it can attract investors to invest their capital. In addition, the control of commodity prices for goods and services needs to be improved so that the public can still reach the rising prices.

Keywords: local revenue; labor; consumer price index; investment; wages

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial. Tujuan suatu pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang di upayakan cara-caranya oleh masyarakat melalui suatu kombinasi berbagai proses sosial ekonomi dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (Todaro & Smith, 2015). Pembangunan ekonomi merupakan usaha-usaha untuk menaikkan taraf hidup suatu bangsa yang sering diukur dengan tingginya rendahnya pendapatan riil per kapita. Akan tetapi, dalam melakukan pembangunan dibutuhkan dana yang besar untuk mencukupinya. Pemerintah dalam hal ini terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah pusat (Maulana and Fadhlia, 2020). Keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah pusat mendorong dilakukannya Undang-Undang otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang.

PAD adalah sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah dan harus diberdayakan. Pemerintah daerah harus memaksimalkan pendapatan asli daerah sendiri untuk mencukupi pengeluaran pembangunan daerah mereka, sehingga penting untuk meningkatkan PAD, dengan harapan daerah mampu mandiri dalam melakukan pembangunan (Yasin, 2020). Tabel 1 menunjukkan perkembangan PAD di seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020. Pendapatan asli daerah di Jawa Tengah tahun 2019 mencapai yang tertinggi dengan total pendapatan sebesar 86.728 miliar rupiah. Akan tetapi, kembali menurun pada tahun selanjutnya yaitu 2020 dengan PAD sebesar 84.708 miliar rupiah. Penurunan ini disebabkan pandemi Covid-19 yang menurunkan aktivitas ekonomi di Indonesia termasuk Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi terbesar di Indonesia, dimana wilayah-wilayah di Jawa Tengah merupakan kawasan-kawasan penting dalam perekonomian di Indonesia. Banyak sektor-sektor ekonomi seperti pertanian dan perikanan yang memasok sebagian besar kebutuhan di Pulau Jawa dan bahkan Indonesia berasal dari Jawa Tengah (Soebagiyo dan Hascaryo, 2015). Selain itu, sektor industri di Jawa Tengah kini mulai dilirik oleh investor untuk mendirikan proses produksinya. Hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah-daerah di Jawa Tengah.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan naiknya pendapatan ini untuk melaksanakan pembangunan guna memajukan daerah mereka (Juliarini, 2019).

Tabel 1
PAD Jawa Tengah Tahun 2017-2020 (Miliar Rupiah)

Wilayah	2017	2018	2019	2020
Cilacap	3.265	3.260	3.584	3.219
Banyumas	3.610	3.319	3.725	3.773
Purbalingga	2.149	1.924	2.201	2.104
Banjarnegara	2.363	2.119	2.222	2.259
Kebumen	2.875	2.652	3.021	3.044
Purworejo	2.454	2.255	2.282	2.483
Wonosobo	2.007	1.856	2.214	2.070
Magelang	2.738	2.486	2.797	2.719
Boyolali	2.329	2.203	2.513	2.480
Klaten	2.956	2.973	3.084	2.907
Sukoharjo	2.443	2.050	2.143	2.401
Wonogiri	2.533	2.246	2.685	2.477
Karanganyar	2.267	2.064	2.469	2.346
Sragen	2.393	2.236	2.578	2.422
Grobogan	2.724	2.345	2.746	2.680
Blora	2.057	2.116	2.322	2.012
Rembang	1.954	1.814	1.975	2.054
Pati	2.926	2.725	3.091	2.910
Kudus	2.165	1.957	2.260	1.911
Jepara	2.394	2.300	2.528	2.399
Demak	2.127	2.050	2.562	2.400
Semarang	2.287	2.171	2.492	2.457
Temanggung	1.902	1.670	1.969	1.996
Kendal	2.344	2.148	2.440	2.451
Batang	1.669	1.687	1.919	1.925
Pekalongan	2.272	2.160	2.353	2.446
Pemalang	2.519	2.324	2.948	2.836
Tegal	2.583	2.575	2.815	2.905
Brebes	2.949	2.825	3.308	3.293
Kota Magelang	1.074	937	1.102	1.006
Kota Surakarta	2.034	1.914	2.134	1.624
Kota Salatiga	1.146	923	1.186	1.006
Kota Semarang	4.782	4.506	4.776	5.319
Kota Pekalongan	1.012	883	1.063	1.060
Kota Tegal	1.137	916	1.202	1.298
Jawa Tengah	82.460	76.605	86.728	84.708

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

PAD adalah perwujudan dari penggalian sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, di mana “Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Hal ini menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk bisa memberdayakan potensi ekonomi yang dimiliki dengan tujuan potensi ekonomi tersebut dapat memaksimalkan pendapatan asli daerahnya (Lubis dan Fitriani, 2018).

Mankiw (2007), menyebutkan bahwa input tenaga kerja terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja. Tenaga kerja yang diserap oleh sektor perekonomian pada suatu daerah akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Apabila sektor perekonomian yang ada pada daerah mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Indeks harga konsumen merupakan indeks yang menggambarkan perubahan harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum

atau merupakan angka yang menggambarkan perbandingan harga konsumen pada suatu periode dengan periode waktu tertentu. Jika harga-harga terus naik dan tidak terkendali dapat menyebabkan inflasi, maka daya beli masyarakat akan menurun sehingga pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah secara langsung juga akan menurun (Wildan, 2018). Modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong perekonomian, jika suatu daerah atau wilayah dapat menciptakan iklim yang baik untuk menarik investor menanamkan modalnya, maka perekonomian dapat dipacu untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah tersebut (Kurniawan et al., 2018).

Upah merupakan hasil yang diterima dari tenaga kerja atas pekerjaan mereka. Upah minimum yang berlaku menggambarkan kondisi perekonomian di wilayah tersebut. Jika upah minimum di suatu wilayah meningkat, maka masyarakat akan mendapatkan penghasilan lebih untuk mencukupi kebutuhan mereka. PAD dapat meningkat karena naiknya konsumsi tersebut melalui pajak pendapatan dan pajak barang dan jasa atas konsumsi masyarakat (Amalia et al., 2019). Menurut latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah dan besarnya pengaruh jumlah tenaga kerja, indeks harga konsumen, investasi, dan upah minimum regional terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah tahun 2017-2020 dengan menggunakan regresi data panel. Keterbatasan lapangan pekerjaan di Indonesia khususnya lulusan universitas dari tahun ke tahun sangat tinggi, sehingga berpotensi untuk tidak dapat tertampungnya lulusan program pendidikan di lapangan kerja setiap tahun semakin meningkat. Pada akhirnya masyarakat akan kehilangan kepercayaan secara signifikan terhadap eksistensi lembaga pendidikan jika masalah pengangguran terdidik masih terus seperti ini di tahun yang akan datang. Perihal inilah yang menarik untuk dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik di Indonesia selama periode 2005-2021.

Weley et al. (2019) dengan menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS), menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan inflasi berpengaruh positif terhadap PAD di Kota Manado tahun 2005-2017. Widodo dan Guritno (2017) menemukan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap PAD di Kota Yogyakarta tahun 2010-2014. Widodo et al. (2019) menemukan bahwa PDRB, investasi termasuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif terhadap PAD tahun 2013-2017 di Bali. Anam dan Kusuma (2019) dengan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effects* menemukan bahwa Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK), penerimaan pajak, dan PDRB berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019. Marita dan Saurdana (2016) dengan menggunakan metode OLS menemukan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, reklame, dan pajak penerangan jalan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Denpasar pada triwulan dari tahun 2009 sampai 2013.

Ramadhan (2019), dengan menggunakan metode *Fixed Effects* menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan PAD Kabupaten atau Kota di Sumatera Utara tahun 2016-2018. Sementara itu, Sukananda dan Mudiparwanto (2020) menemukan bahwa investasi asing tidak berpengaruh terhadap PAD provinsi-provinsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah apakah tenaga kerja, investasi, dan upah minimum regional berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan indeks harga konsumen berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah.

METODE

Penelitian ini akan mengamati arah dan besarnya pengaruh jumlah tenaga kerja, indeks harga konsumen, investasi, dan upah minimum regional terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah tahun 2016-2020 dengan menggunakan regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut:

$$\log PAD_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log TK_{it} + \beta_2 \log INV_{it} + \beta_3 \log UMK_{it} + \beta_4 IHK_{it} + \varepsilon_{it}$$

dimana: PAD = Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rupiah); TK = Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa); INV = Investasi (Juta Rupiah); UMK = Upah Minimum Kabupaten atau Kota (Rupiah); IHK = Indeks Harga Konsumen (Satuan Angka Indeks); log = Operator Logaritma; ε = Error term (faktor kesalahan); β_0 = Konstanta; $\beta_1 \dots \beta_4$ = Koefisien regresi variabel independen; i = Observasi ke i

; dan t = tahun ke t

Persamaan atau model ekonometrik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari artikel Weley et al. (2019), di mana variabel indeks harga konsumen dan investasi ditambahkan agar Pendapatan Asli Daerah di setiap Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat di analisis secara luas melalui kedua variabel makroekonomi tersebut. Data penelitian adalah data panel, yaitu kombinasi antara data *time series* dan data *cross section*. Data *cross section* meliputi 35 Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah, data *time series* meliputi rentang pengamatan 2017-2020. Data yang digunakan meliputi PAD, jumlah tenaga kerja, indeks harga konsumen, realiasi PMA dan PMDN yang dijumlahkan, serta upah minimum regional yang berlaku di setiap wilayah per tahunnya. Data

akan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tahapan estimasi model regresi data panel meliputi pendekatan *Common Effects Model* (CEM), *Fixed Effects Model* (FEM), dan *Random Effects Model* (REM); pemilihan model estimator terbaik dengan Uji Chow dan Uji Hausman; uji kebaikan model; dan uji validitas pengaruh pada model estimator terpilih.

HASIL

Tabel 2
Hasil Estimasi Model Ekonometri

Variabel	CEM		FEM		REM	
	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.	Koefisienn	Prob.
C	13,35732	0,0000	22,27672	0,0000	14,10174	0,0000
LOG(TK)	0,500996	0,0000	-0,296086	0,0554	0,469778	0,0000
LOG(INV)	0,005432	0,4279	-0,006348	0,1574	-0,006406	0,1429
LOG(UMK)	0,097657	0,2218	0,208158	0,0002	0,084221	0,0796
IHK	0,001517	0,1696	0,001369	0,1723	0,001481	0,1139
R ²	0,828825		0,969483		0,490618	
Adj. R ²	0,824749		0,960830		0,478490	
F-stat.	203,3629		112,0279		40,45289	
Prob.(F-stat)	0,000000		0,000000		0,000000	

Uji Pemilihan Model:
 Chow; *Cross-section* F(34, 134) = 18,165884; Prob. F = 0,0000
 Hausman; *Cross-section random* $\chi^2(4) = 28,840498$; Prob. $\chi^2 = 0,000$

Sumber: data olahan

Tabel 2 hasil Uji Chow dan Uji Hausman, terlihat *Fixed Effects Model* (FEM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik, terlihat dari probabilitas statistik F uji Chow yang sebesar 0,000 (< 0,05), dan probabilitas statistik χ^2 uji Hausman, yang sebesar 0,010 (< 0,05). Sementara pada Tabel 3 statistik kebaikan (*goodness of fit*) memperlihatkan bahwa model eksis, terlihat dari probabilitas empirik statistik F, yang sebesar 0,000 (< 0,01), dengan R² atau daya ramal sedang, yakni sebesar 0,969. Artinya, secara keseluruhan variabel independen, tenaga kerja, indeks harga konsumen, investasi, dan upah minimum regional mampu menjelaskan 96,9% variasi PAD.

Tabel 3
Hasil Estimasi *Fixed Effects Model*

$$\log PAD_{it} = 22,277 - 0,296 \log TK_{it} - 0,006 \log INV_{it} + 0,208 \log UMK_{it} + 0,140 IHK_{it}$$

(0,055)*** (0,157) (0,000)* (0,172)

$$R^2 = 0,969; DW = 2,850; F\text{-stat} = 112,028; \text{Prob.}(F\text{-stat}) = 0,000$$

Keterangan: *Signifikan pada $\alpha = 0,01$; ** Signifikan pada $\alpha = 0,05$; *** Signifikan pada $\alpha = 0,10$.

Sumber: data olahan

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Pengaruh

Variabel	Prob.t	Kriteria	Kesimpulan
Log(TK)	0,0554	< 0,10	Signifikan pada $\alpha = 0,10$
Log(INV)	0,1574	> 0,10	Tidak berpengaruh
Log(UMK)	0,0002	< 0,01	Signifikan pada $\alpha = 0,01$
IHK	0,1723	> 0,01	Tidak berpengaruh

Sumber: data olahan

Jumlah Tenaga Kerja dan UMK berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan masing-masing probabilitas empirik statistik t sebesar 0,055 (< 0,10) dan 0,000 (< 0,01). Sementara itu, Indeks Harga Konsumen dan Investasi tidak berpengaruh terhadap PAD karena memiliki probabilitas empirik statistik t sebesar 0,157 (> 0,10) dan 0,172 (> 0,10). Jumlah tenaga kerja memiliki koefisien regresi sebesar -0,296 yang berarti bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap PAD. Pola hubungan yang digunakan variabel ini terhadap PAD adalah logaritma-logaritma, sehingga apabila jumlah tenaga kerja naik sebesar 1%, maka PAD akan turun sebesar 0,296%. Sebaliknya apabila jumlah tenaga kerja turun sebesar 1%, maka PAD akan naik sebesar 0,296%. UMK memiliki koefisien regresi

sebesar 0,236 yang berarti bahwa UMK berpengaruh positif terhadap PAD. Pola hubungan yang digunakan variabel ini terhadap PAD adalah logaritma-logaritma, sehingga apabila UMK naik sebesar 1%, maka PAD juga akan naik sebesar 0,236%. Sebaliknya apabila UMK turun 1%, maka PAD juga akan turun sebesar 0,236%.

Berdasarkan hasil uji validitas pengaruh, jumlah tenaga kerja ditemukan berpengaruh negatif terhadap PAD di tiap wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh kemajuan di sektor industri yang mulai berkembang pesat di Jawa Tengah. Sektor industri dengan tipe padat modal ini menyebabkan penggunaan teknologi dalam berbagai sektor perekonomian, sehingga peran tenaga kerja mulai terancam. Dengan demikian, naiknya pendapatan daerah dan perekonomian daerah tidak sejalan dengan kondisi tenaga kerja yang terjadi. Hasil dalam penelitian ini didukung oleh temuan Tianto (2022) yang menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor formal berpengaruh negatif terhadap PAD di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap PAD di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut disebabkan rendahnya realisasi investasi di sebagian besar wilayah di Jawa Tengah. Selain itu, investasi hanya terpusat di beberapa wilayah besar seperti di Solo Raya dan Kota Semarang, sehingga naiknya pembangunan infrastruktur dan tingginya aktivitas perekonomian cenderung tidak merata dan pada akhirnya tidak terlalu berdampak pada pendapatan daerah secara keseluruhan. Hasil ini sejalan dengan Kurniawan et al. (2018) yang menyatakan bahwa investasi swasta tidak berpengaruh terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Kutai Barat tahun 2004-2015.

Hasil uji validitas pengaruh menyatakan bahwa UMK berpengaruh positif terhadap PAD di Jawa Tengah. UMK merupakan besaran upah minimal yang berlaku di suatu wilayah, jika upah yang diterima oleh para tenaga kerja naik, maka akan meningkatkan PAD melalui pajak pendapatan. Selain itu, naiknya upah juga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat, sehingga mereka akan lebih banyak mengeluarkan pajak barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut. Penelitian ini mendukung hasil temuan Amalia et al. (2019) yang juga menemukan pengaruh positif dari naiknya pajak terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten atau Kota di Jawa Timur tahun 2011-2015. Hasil uji t memperlihatkan IHK tidak berpengaruh terhadap penerimaan PAD di 35 Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya IHK di sebagian besar wilayah di Jawa Tengah. Selain itu, banyak bahan kebutuhan pokok dapat diproduksi di dalam wilayah di Jawa Tengah, sehingga masyarakat masih mampu menjangkau harga-harga kebutuhan pokok karena masih cenderung murah karena tidak memerlukan biaya distribusi yang panjang. Hasil ini sejalan dengan temuan Weley et al. (2019) yang menyatakan bahwa IHK tidak berpengaruh terhadap PAD di Kota Manado.

SIMPULAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan representasi dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Jawa Tengah adalah wilayah dengan potensi daerah yang besar. Optimalisasi dan peningkatan potensi daerah perlu dimaksimalkan agar dapat meningkatkan penerimaan PAD yang digunakan untuk melakukan pembangunan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Hasil dalam penelitian dengan model terpilih yaitu *Fixed Effects Model* (FEM) menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap PAD, sedangkan UMK berpengaruh positif terhadap PAD. Sementara itu, investasi dan IHK ditemukan tidak berpengaruh terhadap PAD di 35 Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah tahun 2016-2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, C. R., Susilowati, D. dan Sudarti, 2019, Pengaruh Upah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota Di Jawa Timur Tahun 2011-2015, *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(2), 178–193.
- Juliarini, A. 2019, Kinerja Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi Di Pulau Jawa, *Jurnal Good Governance*, 15(1), 934–957.
- Kurniawan, A. I., Militina, T. dan Suharto, R. B. 2018, Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi, *Inovasi*, 13(2), 82. doi: 10.29264/jinv.v13i2.2453.
- Lubis, R. H. dan Fitriani. 2018, Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn) Dan Penanaman Modal Asing (Pma) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016, *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 6(2), 114-120.
- Mankiw, N.G. 2007. *Makroekonomi: Edisi ke Empat*. Jakarta: Erlangga.
- Marita, N. M. dan Saurdana, K. A. 2016, Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(1), 53–65.
- Maulana, F. dan Fadhlia, W. 2020, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 362–371.
- Ramadhan, P. R. 2019, Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di

- Sumatera Utara, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 81-90.
- Soebagiyo, D. dan Hascaryo, A. S. 2015, Analisis Sektor Unggulan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jawa Tengah, *Univesity Research Colloquium*, 138–151.
- Sukananda, S. dan Mudiparwanto, W. A. 2020, Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia, *Diversi: Jurnal Hukum*, 5(2).
- Tianto, R. 2022, Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 113–124.
- Todaro, M. P. dan Stephen, C. S. 2015. *Pembangunan Ekonomi: Edisi ke Sembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Weley, I. R., Kumenaung, A. G. dan Sumual, J. I. 2019, Analisis Pengaruh Inflasi Dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado, *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 1–10.
- Wildan, W. 2018, Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 1(3), 200–206.
- Yasin, M. 2020, Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur, *Journal of Economic, Bussines and Accounting (Costing)*, 3(2), 465–472.